

**PERAN UNITED NATIONS WOMEN (UN WOMEN) DALAM
MEMBANTU MENGURANGI PERBUDAKAN KONTEMPORER
PADA PEREMPUAN DI MAURITANIA**

Oleh : Ferina Putri Irawan

Pembimbing: Dr. Umi O Retnaningsih, MA

Jurusan Hubungan Internasional`

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Contemporary slavery is still occurring in Mauritania despite of international pressure and the state's obligation to comply with international law for abolishing the practice of slavery. Misperceptions of religion, poverty, lack of education, and low positive responses of the government make the problem more difficult to solve. Ethnic and gender discrimination place Haratine women as vulnerable victims and find it difficult to emancipate themselves from slavery without outside help. This research aims to understand the role and effectiveness of an international organization in overcoming the phenomenon of the humanitarian crisis that has occurred to women due to contemporary slavery in Mauritania.

This research was written using the theory of international organizations where the actor involved in this research problem is UN Women. This study also used explanatory qualitative methodology with secondary sources and data based on books, journals, and online literature such as reports, newspapers, and official articles from UN Women and other UN entities, the government of Mauritania, Mauritania non-governmental organizations and other independent international organizations.

The results showed that UN Women contributed to increasing women's participation in economic and educational aspects and reducing contemporary slavery to women through the UN Women project in Mauritania. The implemented program consists of reforming the law on the criminalization of slavery, raising awareness by involving various local and international parties, expanding access to economics and education, and providing legal aid. In addition to UN Women's efforts, the government's commitment in deciding and implementing policies is also needed to end slavery and violence against women as it's consequences.

Keywords: *Contemporary Slavery, Discrimination, International Organizations, UN Women, Violence Against Women*

Pendahuluan

Perbudakan telah menjadi isu yang pernah dipraktikkan oleh hampir sebagian besar negara-negara di dunia. Namun eksistensi perbudakan perlahan memudar dari sistem sosial dan menjadi ilegal karena hukum internasional melarang segala bentuk praktik terkait perbudakan. Terlepas dari ilegalitasnya, perbudakan secara *de facto* masih terjadi di beberapa negara hingga saat ini sebagai perbudakan kontemporer. Survei dari Walk Free Foundation (WFF) dalam *Global Slavery Index* (GSI) pada menyebutkan sekitar 40,3 juta orang masih hidup dalam perbudakan kontemporer.¹ Anti-Slavery International (ASI) juga mencatat setidaknya terdapat 40 juta orang dimana sebanyak 71% perempuan dan 25% anak-anak masih terjebak dalam perbudakan.²

Perbudakan kontemporer merupakan evolusi dari perbudakan tradisional terkait kontrol individu atau kelompok terhadap manusia untuk tujuan eksploitasi ekonomi. Praktik dan kepemilikan budak yang semula disetujui oleh hukum secara bertahap dikriminalisasikan. Ancaman, paksaan, penipuan, kekerasan, penyerangan seksual, penganiayaan fisik, dan penyalahgunaan kekuasaan digunakan untuk mempertahankan

kepemilikan budak dalam perbudakan kontemporer yang menghasilkan dehumanisasi dan pembatasan kebebasan hak manusia.³ Dukungan historis, sumber daya yang terbatas, demografi yang lemah, dan kurang responsifnya pemerintahan dalam menegakkan hukum perbudakan menjadi akar masalah perbudakan masih terjadi saat ini. Praktik-praktik dalam perbudakan kontemporer sebagaimana yang diidentifikasi United Nations (UN) meliputi perbudakan turun-temurun, penghambaan dalam rumah tangga, kerja paksa, perdagangan orang, pernikahan paksa, eksploitasi seksual, prostitusi, dan jeratan hutang.⁴

Tulisan ini berfokus pada masalah perbudakan kontemporer di Mauritania sebagai salah satu negara di kawasan Afrika Barat yang telah berhubungan erat dengan sejarah perbudakan dan bertahan menjadi tempat di mana perbudakan relatif terjadi.⁵ Ada beberapa alasan mengapa penelitian ini begitu menarik. Pertama, Mauritania secara konsisten diperingkat sebagai tempat terburuk di dunia untuk perbudakan karena tingginya jumlah orang yang hidup dalam perbudakan.

¹ Walk Free Foundation (WFF), 2018, *The Global Slavery Index 2018*, dalam https://downloads.globalslaveryindex.org/epihemeral/GSI-2018_FNL_190828_CO_DIGITAL_P-1642269405.pdf [Diakses 21 Juni 2021].

² Anti Slavery International (ASI), 2018, *What is Modern Slavery*, dalam www.antislavery.org/slavery-today/modern-slavery/ [Diakses 10 Juni 2021].

³ Kam Phung and Andrew Crane, 2019, *The Sage Handbook of Human Trafficking and Modern Day Slavery: The Business of Modern Slavery: Management and Organizational Perspectives*, California: SAGE Publications Inc., hal. 179.

⁴ United Nations (UN), 2017, *International Day for the Abolition of Slavery*, dalam <https://www.un.org/en/observances/slavery-abolition-day> [Diakses 11 Juni 2021].

⁵ Paul E. Lovejoy, 2011, *Transformations in Slavery: A History of Slavery in Africa*, 3rd ed., Cambridge: Cambridge University Press, hal. 1

Data yang diterbitkan oleh WFF dalam laporan GSI pada tahun 2013 dan 2014 menempatkan Mauritania sebagai negara dengan tingkat prevalensi perbudakan tertinggi di dunia dengan estimasi populasi perbudakan sebesar 4% dari total penduduk.⁶

Kedua, praktik perbudakan kontemporer di Mauritania masih mempertahankan beberapa kondisi perbudakan tradisional yang mendiskriminasi suatu etnis, seperti perbudakan turun-temurun yang terjadi pada etnis Haratine.⁷ Keberlangsungan perbudakan ini juga disebabkan oleh aspek geografis dan demografi yang lemah serta aspek sosial yang dilakukan Arab Berber sebagai pelaku utama perbudakan untuk mempertahankan kendali dan kepemilikan budak.

Ketiga, perbudakan kontemporer di Mauritania secara konsisten memengaruhi perempuan. Menurut laporan ASI, perempuan mewakili 80% korban perbudakan yang terjadi di Mauritania.⁸ Di bawah sistem perbudakan yang mendiskriminasi etnis dan gender, perempuan Haratine menghadapi penderitaan ganda. Perbudakan menyebabkan mereka tidak hanya rentan untuk

dieksploitasi pekerjaan namun juga eksploitasi seksual.

Tekanan internasional terkait masalah perbudakan yang menyebar di Mauritania hanya ditanggapi pemerintah tanpa melakukan usaha signifikan untuk mengurangnya. Meskipun Mauritania telah meratifikasi berbagai perlindungan hukum internasional dan regional terkait perbudakan kontemporer, namun laporan tingginya kasus perbudakan yang dialami perempuan masih dipublikasikan oleh Pengamat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional.⁹ Oleh karena itu, tulisan ini akan menjelaskan peran UN Women sebagai organisasi internasional dalam menanggulangi permasalahan yang telah dipaparkan berdasarkan program UN Women yang dimulai pada tahun 2014 yang berfokus pada penanganan masalah perbudakan pada perempuan di Mauritania.

Kerangka Dasar Teori

Tingkat analisa dalam pembahasan ini menggunakan *international level* atau sistem internasional yang berfokus pada UN Women sebagai organisasi internasional dimana perilakunyalah yang hendak diamati serta pengaruh yang diciptakan dalam proses interaksi internasional, khususnya interaksi dengan negara anggota

⁶ WFF, *Laporan Global Slavery Index Tahun 2013 dan 2014*, dalam <https://www.globallslaveryindex.org/> [Diakses 11 Juni 2021].

⁷ ASI, 2018, *Mauritania : Descent-Based Slavery*, dalam www.antislavery.org/what-we-do/mauritania/ [Diakses 25 April 2020].

⁸ ASI, 2018, *Mauritanian Women Against Slavery*, dalam <https://www.antislavery.org/mauritanian-women-slavery-feature/> [Diakses 26 Januari 2021].

⁹ Veronika Gyuracz, 2014, *Comparative Analysis of Contemporary Slavery in West Africa*, Hungary: Corvinus University of Budapest, hal. 159, dalam <https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/4018/3829> [Diakses 12 Februari 2019].

berdasarkan sistem yang telah disepakati.

Perspektif yang digunakan adalah liberalisme institusional. Liberalisme institusional mengklaim bahwa institusi-institusi internasional memainkan peran penting dalam membentuk jalannya hubungan antarnegara untuk dapat meningkatkan dan membantu kerja sama antarnegara.¹⁰ Menurut Robert Keohane, neoliberalisme adalah sebuah perspektif tentang dunia politik yang befokus pada institusi-institusi internasional, fungsi-fungsinya, dan pengaruhnya terhadap tindakan negara.¹¹ Kehadiran institusi internasional seperti organisasi internasional dapat menjadi seperangkat aturan yang mengatur tindakan negara dalam bidang-bidang tertentu, menciptakan dinamika hubungan internasional sebagai proses dari interdependensi yang kompleks, menghasilkan negosiasi dan kompromi yang dapat memenuhi kepentingan semua pihak.¹²

Teori yang dikemukakan dalam melihat pendekatan atas permasalahan dalam penelitian ini adalah teori organisasi internasional (OI). Menurut Clive Archer, OI memiliki peran dan fungsi yang

memainkan peran penting dalam hubungan internasional. OI menjalankan tiga peran utama yaitu sebagai instrumen, sebagai forum atau arena, dan sebagai aktor.¹³ Peran-peran ini disejajarkan dengan fungsinya untuk membentuk norma, mengartikulasi dan agregasi kepentingan, sosialisasi, membuat dan menerapkan aturan, menyelesaikan permasalahan, menyediakan dan menyalurkan informasi, dan memberikan bantuan dengan terlibat langsung dalam masalah komoditas. OI juga menjalankan fungsi sebagai lembaga yang bertugas untuk mengadili dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi antar negara.¹⁴

Terkait kasus penelitian ini, peran yang dimiliki UN Women sebagai organisasi internasional dapat menjalankan fungsinya di negara-negara anggota yang memiliki masalah-masalah khusus yang dihadapi perempuan dengan menawarkan solusi dan meyakinkan negara anggota untuk menerimanya. Kehadiran UN Women diharapkan dapat memberikan bantuan penting kepada perempuan yang kehilangan haknya akibat praktik perbudakan kontemporer di Mauritania melalui program untuk membantu perempuan meninggalkan perbudakan dan mendapatkan manfaat jangka panjang.

¹⁰ Umar Suryadi Bakry, 2017, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*, Depok: Kencana, hal. 105-107.

¹¹ Robert Keohane, 2016, *International Institutions and State Power: Essays in International Relations Theory*, dalam Umar Suryadi Bakry, 2017, *Op.cit.*, hal. 107.

¹² Vinsensio Dugis, 2016, *Teori Hubungan Internasional: Perspektif-Perspektif Klasik*, Surabaya: Cakra Studi Global Startegis, hal. 74-75.

¹³ Clive Archer, 2001, *International Organization*, 3rd ed., New York: Routledge, hal. 68-79.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 94-108.

Pembahasan

Preferensi UN Women dalam Perbudakan Kontemporer di Mauritania

Isu perbudakan di Mauritania mulai mendapatkan perhatian masyarakat internasional setelah CNN mempublikasikan sebuah film dokumenter rahasia pada tahun 2012 yang menyoroti kondisi perbudakan dengan cakupan yang lebih luas dan dirahasiakan.¹⁵ Dari sudut pandang akademis, bertahannya praktik perbudakan disebabkan oleh tingginya angka kemiskinan dan tingkat buta huruf di Mauritania yang dikombinasikan dengan kompleksitas masyarakat menghadapi ekonomi global. Namun, organisasi-organisasi pembela hak asasi manusia setuju bahwa lemahnya hukum dan tidak adanya keadilan menjadi masalah mendasar bertahannya momok perbudakan di Mauritania.¹⁶

UN Women sebagai OI memiliki peran yang dapat memberikan bantuan kepada Mauritania sebagai negara anggota dalam memenuhi hak-hak korban yang hilang akibat praktik perbudakan kontemporer yang meluas. Peran UN Women ini dilandasi oleh:

- a. UN Women sebagai instrumen. UN Women memandang perbudakan turun-temurun di Mauritania dianggap sebagai bentuk yang sangat khusus dari kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan karena menciptakan sistem diskriminasi berbasis gender dan etnis.¹⁷ UN Women dibuat dengan tujuan khusus yang dapat memenuhi kepentingan negara anggotanya dalam mempercepat fokus masalah diskriminasi dan kekerasan pada perempuan serta memastikan perempuan dan anak perempuan mendapatkan manfaatnya.
- b. UN Women sebagai forum. Permasalahan yang dianggap sebagai kekerasan terhadap perempuan diselesaikan UN Women secara khusus melalui pemberian hibah dari pengelolaan UNTF. UN Women menjadi forum untuk mendapatkan kontribusi keuangan dan dukungan politik dari berbagai mitra pendonor untuk menangani masalah-masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di negara-negara anggota. Penanganan masalah perbudakan pada perempuan di

¹⁵ John D. Sutter, 2012, *Mauritania Slavery's Last Stronghold*, dalam <https://edition.cnn.com/interactive/2012/03/world/mauritania.slaverys.last.stronghold/index.html> [Diakses 25 Juli 2021].

¹⁶ Alice Bullard, 2005, *De la Kolonisasi la Mondialisation. Les Vicissitudes de l'esclavage en Mauritanie*, Vol. 45, Cahiers d'Études Africaines, hal. 753, dalam <https://journals.openedition.org/etudesafricaines/14997> [Diakses 25 Juni 2021].

¹⁷ Carolyn Norris, 2017, *Final Evaluation of UN Violence against Women project in Mauritania entitled: Justice for women leaving slavery, 1 February 2014 to 1 February 2017, Implemented by SOS-Eslaves*, hal. 7, dalam https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20untf/publications/2017/final%20evaluation/evaluation%20report%20final_untf%20mauritania-edited_compressed.pdf?la=en&vs=3057 [Diakses 14 Februari 2019].

Mauritania dilakukan UN Women dengan memberikan hibah dan menawarkan program-program yang telah dirancang untuk menangani masalah-masalah yang dianggap memiliki potensi kekerasan pada perempuan.

- c. UN Women sebagai aktor independen. UN Women memiliki resolusi dan rekomendasi yang dapat membantu negara-negara anggotanya dan terlibat dalam masalah komoditas. Bantuan UN Women di Mauritania dilakukan dalam proyek untuk membantu perempuan yang kehilangan haknya akibat perbudakan kontemporer di Mauritania dan membantu pemerintah memenuhi tekanan internasional untuk mengurangi jumlah populasi perbudakan yang tersebar luas di Mauritania.

Proyek UN Women di Mauritania: *La Justice pour les Rescapées de L'esclavage*

Proyek UN Women di Mauritania merupakan proyek yang dilakukan bersama SOS-Esclaves dan ASI dengan dilandasi beberapa hal yang menjadi perhatian UN Women. *Pertama*, kekuatan dan pengalaman SOS-Esclaves dan ASI yang cukup besar dalam mengakhiri perbudakan kontemporer di Mauritania.¹⁸ *Kedua*, laporan yang disusun SOS-Esclaves, ASI, dan

mitra internasional terkait faktor-faktor masalah perbudakan dan situasi khusus perempuan dalam perbudakan telah menjadi pertimbangan bagi Komite Hak Asasi Manusia PBB dan Komite CEDAW sebagai bahan observasi akhir untuk pemerintah Mauritania pada tahun 2013 dan 2014. *Ketiga*, laporan yang dipublikasikan Pelapor Khusus PBB tentang Perbudakan Kontemporer tahun 2014 memaparkan masalah perbudakan yang terjadi dan mengkritik masih kurangnya implementasi undang-undang anti-perbudakan di Mauritania.¹⁹ Keseluruhan laporan telah berhasil menempatkan kasus perbudakan di Mauritania menjadi perhatian ditingkat internasional.

Proyek UN Women di Mauritania memiliki tiga program utama, yaitu reformasi dan implementasi hukum, kebijakan, dan rencana aksi nasional, peningkatan kesadaran, serta perluasan akses ke layanan multisektoral yang mana memiliki relevansi dengan CEDAW, *Beijing Platform for Action*, MDGs, dan SDGs.

Kontribusi UN Women di Mauritania melalui Proyek Pengurangan Perbudakan Kontemporer pada Perempuan di Mauritania

¹⁸ ASI, MRG International et SOS-Esclaves, 2019, *Rapport Alternatif pour le Comité des Droits de l'Homme, 126ème Session*, hal. 1, dalam <https://minorityrights.org/wp-content/uploads/2019/06/2019-CCPR-Mauritania-Update-June-2019.pdf> [Diakses 23 Juni 2021].

¹⁹ UN Human Rights Council (UNHRC), 2014, *Report of the Special Rapporteur on Contemporary Forms of Slavery, Including Its Causes and Consequences, Gulnara Shahinian: Follow-up on mission to Mauritania, A/HRC/27/53/Add.1*, para. 36-44, hal. 10-12, dalam https://digitallibrary.un.org/record/778854/files/A_HRC_27_53_Add-1-EN.pdf [Diakses 21 Desember 2019].

Proyek UN Women merupakan salah satu langkah untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat Mauritania yang menempatkan perempuan Haratine sebagai subjek utama pada eksploitasi dan dehumanisasi. Melalui program-program yang menasar pada perbaikan kondisi perempuan dalam perbudakan, hasil yang dicapai memainkan peran penting dalam mempromosikan hak-hak perempuan dan mengakhiri perbudakan serta berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Reformasi dan Implementasi Hukum, Kebijakan, dan Rencana Aksi Nasional

Advokasi yang dilakukan UN Women bersama SOS Esclaves telah membantu Pemerintah Mauritania dalam mengelaborasi undang-undang baru yang komprehensif terhadap perbudakan dan mengedepankan masalah utama yang dihadapi perempuan dalam perbudakan.

Legislasi kriminalisasi perbudakan diperkuat melalui Undang-Undang No. 2015-031 Tahun 2015 menggantikan Undang-Undang No.2007-048 Tahun 2007 dengan penambahan elemen seperti definisi perbudakan dan praktik serupa perbudakan yang disesuaikan dengan Konvensi Tambahan tentang Penghapusan Perbudakan, Perdagangan dan Lembaga Perbudakan serta praktik yang sama dengan Perbudakan 1956.²⁰

²⁰ *Loi n° 2015-031 Portant Incrimination de l'esclavage et Réprimant les Pratiques Esclavagistes, Chapitre Preliminaire*, dalam <http://www.cdah.gov.mr/images/RECUEIL>

Reformasi legislasi ini memberikan penekanan khusus pada hak-hak korban berupa kompensasi dan bantuan hukum. Hukuman yang ditetapkan tidak hanya menggandakan hukuman dari UU kriminalisasi perbudakan sebelumnya namun juga menjadi hukuman yang terberat diantara kejahatan berat lainnya.²¹ Organisasi hak asasi manusia yang telah terdaftar secara hukum di Mauritania selama lima tahun diberikan hak peran sipil yang dapat mengadakan pelanggaran hukum dan membawa kasus atas nama korban ke pengadilan.²²

Pasal 20 UU No.2015-031 Tahun 2015 mengatur tentang pembentukan pengadilan untuk menangani pelanggaran yang berkaitan dengan perbudakan dan praktik serupa perbudakan.²³ Pasal ini kemudian diperjelas melalui Keputusan 2016-002 Tahun 2016 mengenai pembentukan tiga pengadilan khusus di tiga kota sebagai perwakilan masing-masing region di Mauritania. Ketentuan terkait kompensasi, bantuan, dan hukuman diputuskan melalui pengadilan khusus.

Pasal 2 UU No. 2015-031 Tahun menetapkan tanggal 6 Maret sebagai hari nasional yang didedikasikan untuk memerangi

[TEXTESDROITSDELHOMME2019.pdf](#)
[Diakses 26 Juli 2021].

²¹ U.S. Department of State, 2016 *Trafficking in Persons Report: Mauritania*, <https://www.refworld.org/docid/577f95d62f.html> [Diakses 15 September 2021].

²² *Loi n° 2015-031 Portant Incrimination de l'esclavage et Réprimant les Pratiques Esclavagistes, Article 22-23, Op.cit.*, hal. 34.

²³ *Ibid.*, Article 20.

praktik perbudakan.²⁴ Hari nasional perjuangan melawan perbudakan diperingati melalui beragam perayaan yang dijabarkan dalam Keputusan No. 2016-077 Tahun 2016 dan dibawah pengawasan Komisioner Hak Asasi Manusia, Aksi Kemanusiaan, dan Hubungan Masyarakat Sipil.²⁵

Peningkatan Kesadaran

Program peningkatan kesadaran dalam proyek UN Women di Mauritania menasar pada beberapa pihak untuk memaksimalkan dampak yang dihasilkan. UN Women untuk memperkuat anggota SOS-Esclaves dengan melatih 60 anggota yang dikhususkan pada anggota perempuan untuk menjadi *role model* dalam memperkuat pesan-pesan advokasi mengenai hak-hak perempuan dan keturunan budak. Pelatihan tersebut meliputi laporan penelitian, advokasi peningkatan kesadaran, kredit mikro, kursus keterampilan, dan bantuan hukum.²⁶

Anggota SOS-Esclaves terlatih mengintegrasikan informasi yang didapatkan kepada jaringan solidaritas dan Mentor Perempuan melalui pelatihan pengembangan kapasitas untuk membantu korban perbudakan menuju emansipasi.

Selama berlangsungnya proyek, dukungan dari UN Women dan anggota proyek SOS-Esclaves telah membantu jaringan solidaritas menyelamatkan 38 perempuan yang menjadi korban perbudakan, melalui pelarian diri atau bantuan hukum.²⁷

UN Women bersama SOS-Esclaves, jaringan solidaritas, dan mentor perempuan membuat pelatihan dan lokakarya yang menasar langsung perempuan korban perbudakan dan masyarakat dengan penguasaan tema-tema yang dibahas seperti hak-hak perempuan dan sarana internasional serta pengetahuan pentingnya memiliki surat sipil yang selama ini menghambat budak mengakses pendidikan atau layanan publik lainnya. Lebih dari 1.260 orang yang didominasi oleh perempuan berpartisipasi dalam sesi peningkatan kesadaran.²⁸

UN Women juga melakukan kerja sama dengan pemerintah melalui Sesi Informasi yang melatih 30 petugas peradilan yang terdiri dari pengacara, hakim, dan jaksa, 50 panitera, dan 60 petugas polisi.²⁹ Sesi

²⁷ *Ibid.*, hal. 16-18.

²⁸ UNHRC, 2017, *Report of the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women on the activities of the United Nations Trust Fund in Support of Actions to Eliminate Violence against Women*, A/HRC/35/3-E/CN.6/2017/7, para. 61, hal. 14, dalam <https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/35/3-E/CN.6/2017/7> [Diakses 28 Juli 2021].

²⁹ UN Women, 2015, *United Nations Trust Fund to End Violence Against Women Annual Report 2015: 20 Years of Grant-Making*, hal. 38, dalam <https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20un/f/publications/>

²⁴ *Decret N° 2016-077 Du 15 Avril 2016 Instituant Une Journee Nationale de Lutte Contre les Pratiques Esclavagistes, Chapitre Premier : Dispositions Generales, Article 2-3, Op.cit.*, hal. 37.

²⁵ *Decret N° 2016-077 Du 15 Avril 2016 Instituant Une Journee Nationale de Lutte Contre les Pratiques Esclavagistes, Chapitre Deuxieme: Celebration de la Journee, Article 4-5, Op.cit.*, hal. 37.

²⁶ Carolyn Norris, *Op.cit.*, hal. 29 dan 35-36.

Informasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan otoritas terkait dalam mengidentifikasi dan menginvestigasi kasus dengan memberikan pemahaman dan penggunaan hukum kriminalisasi perbudakan sehingga kasus-kasus yang dilaporkan dapat ditangani dengan baik tanpa adanya impunitas yang merugikan korban. Selain pelatihan mengenai penegakan hukum melawan perbudakan, otoritas terkait juga diberikan pemahaman mengenai relevansi perbudakan dengan perdagangan orang yang banyak memengaruhi perempuan di Mauritania.

Peningkatan kesadaran tentang ilegalitas perbudakan dan pemahaman UU No. 2015-031 Tahun 2015 juga menyasar pada 60 perwakilan kementerian dan 60 tokoh masyarakat atau pemimpin agama.³⁰ Upaya ini menghasilkan penerbitan sebuah fatwa pada tahun 2015 oleh Persatuan Ulama tentang tidak sahnya praktik perbudakan.³¹ Tahun 2018 Kementerian Urusan Islam bekerja sama dengan Persatuan Imam Nasional menyelenggarakan

tiga simposium tentang sisa-sisa perbudakan.³²

UN Women bersama SOS-Esclaves dan ASI melakukan advokasi terhadap pihak yang dinilai dapat membawa dampak signifikan pada perempuan Haratine, yakni melalui media massa nasional dan arena internasional. Keberhasilan advokasi di tingkat internasional dibuktikan melalui tindakan afirmatif pemerintah yang didasarkan pada rekomendasi final kelompok kerja UPR. Beberapa tindakan mengarah pada perbaikan kondisi perempuan Haratine sebagai korban perbudakan dan penyintas

Perluasan Akses ke Layanan Multi Sektor

Tantangan utama korban perbudakan yang telah bebas ialah melanjutkan hidup dengan keterbatasan finansial, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki. Proyek UN Women di Mauritania tidak sekadar membantu korban bebas dari kondisi perbudakan, namun juga memberikan akses yang membantu korban berintegrasi dalam masyarakat.

UN Women bersama SOS-Esclaves dan jaringan solidaritas menyediakan keuangan darurat yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar serta rehabilitasi bagi perempuan yang meninggalkan perbudakan. Mereka tidak hanya difasilitasi dengan informasi penting

[2016/06/un%20trust%20fund%202015%20annual%20report-spreads.pdf?la=en&vs=3034](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/173/46/PDF/G1517346.pdf?la=en&vs=3034) [Diakses 28 Juli 2021].

³⁰ Carolyn Norris, *Op.cit.*, hal. 35

³¹ UNHRC, 2015, *National Report Submitted in Accordance with Paragraph 5 of the Annex to Human Rights Council Resolution 16/21: Mauritania*, A/HRC/WG.6/23/MRT/1, para. 78, hal. 13, dalam <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/173/46/PDF/G1517346.pdf> [Diakses 21 Juli 2021].

³² U.S. Department of State, 2015 *Trafficking in Persons Report: Mauritania*, dalam <https://www.refworld.org/docid/55b73bc515.html> [Diakses 15 September 2021].

untuk berintegrasi sosial namun juga pelatihan peningkatan kemampuan yang dapat dimanfaatkan sebagai pekerjaan, seperti pelatihan keterampilan menjahit dan menyulam. Sasaran penerima manfaat program ini tidak hanya perempuan yang dibebaskan melalui proyek, namun juga para penyintas lainnya.³³

UN Women dan SOS-Esclaves menyediakan dukungan pendidikan bagi penyintas perbudakan dewasa dan anak-anak dari korban perbudakan. Dukungan pendidikan bagi penyintas perbudakan dewasa dilakukan dengan menyediakan kelas literasi yang meningkatkan kemampuan membaca dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup setelah lepas dari perbudakan. Upaya ini telah membawa 38 perempuan yang sebelumnya telah diselamatkan selama proyek untuk berpartisipasi dalam kelas literasi.³⁴

Anak-anak dari korban perbudakan difasilitasi akses yang mendukung ke pendidikan, seperti perlindungan dan motivasi untuk bersekolah serta dokumen sipil yang selama ini menjadi hambatan bagi korban perbudakan dalam mengakses berbagai fasilitas. Proyek UN Women ini telah membantu 10 anak dari perempuan korban perbudakan yang melarikan diri untuk terdaftar di sekolah. Program ini juga berupaya memperoleh surat sipil untuk menjamin status pendidikan anak-anak dari korban perbudakan.

Setidaknya 6 anak telah dibantu untuk mendapatkan dokumen sipil.³⁵

Sebagian besar korban perbudakan dan para penyintas mengalami hambatan dalam menuntut pemilik budak karena keterbatasan kemampuan yang membuat budak tidak dapat mengajukan kasus atau menarik kembali kasus yang telah diajukan. UN Women berupaya mengawal korban dalam mengajukan kasus ke pengadilan dari awal hingga akhir prosedur demi mencapai keadilan atas hilangnya hak-hak kemanusiaan korban selama diperbudak, khususnya perempuan yang paling banyak kehilangan haknya dalam perbudakan di Mauritania. Proyek UN Women telah membawa 18 kasus perbudakan ke pengadilan atas nama perempuan-perempuan yang sebelumnya telah dibantu melarikan diri atau diamankan.

Perubahan Kondisi Perempuan dengan Keterlibatan UN Women pada Pengurangan Perbudakan Kontemporer di Mauritania

Proyek UN Women di Mauritania telah berhasil memberikan perubahan positif dengan dukungan program yang dibuat pemerintah untuk memberantas perbudakan dan memberdayakan perempuan sebagaimana hasil dari advokasi UN Women selama proyek berlangsung. Pada bidang ekonomi, program yang dibuat pemerintah untuk mengoptimalkan pemberdayaan dan partisipasi aktif perempuan khusus-nya yang terdampak perbudakan, telah membantu sekitar

³³ Carolyn Norris, *Op.cit.*, hal. 14 & 35.

³⁴ *Ibid.*, hal. 29

³⁵ *Ibid.*, hal. 19, 64-68.

6.000 perempuan untuk menciptakan usaha mikro dengan partisipasi sektor simpan pinjam dan kredit keuangan mikro mencapai 70%.³⁶ Keberhasilan ini juga dibuktikan dengan peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 2,8% dalam kurun waktu 5 tahun. Jumlah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan peningkatan jumlah penduduk perempuan sekitar 1,09%. Peningkatan yang lebih baik juga terlihat dari estimasi pendapatan yang diperoleh perempuan dengan nilai peningkatan sebesar 1,54%.

Perubahan yang lebih baik terkait akses perempuan ke pendidikan terletak pada peningkatan komponen pendukung pendidikan di Mauritania. Selain fasilitas akses pendidikan bagi perempuan dan anak-anak korban perbudakan dari proyek UN Women, pemerintah Mauritania juga meningkatkan anggaran pendidikan sebesar 190% untuk membangun lebih dari 400 ruang kelas bersamaan dengan pembangunan 79 sekolah pendidikan dasar dan 42 sekolah pendidikan menengah.³⁷ Akses yang disediakan memberikan peningkatan yang konsisten terhadap pendidikan dasar dan pendidikan menengah perempuan di Mauritania.

Peningkatan pembangunan perempuan secara perlahan dan

konsisten mengartikan bahwa harapan hidup, pengetahuan, dan standar hidup perempuan Mauritania mengalami perubahan yang lebih baik setiap tahunnya. Namun perubahan tidak sepenuhnya menysasar pada perempuan Haratine. Hal ini disebabkan karena sistem patriarki membatasi kemampuan semua perempuan di Mauritania, khususnya dalam pekerjaan dan pendidikan.³⁸

Perubahan yang lebih baik memang terjadi dalam selang waktu 2014-2018 dengan penurunan jumlah orang yang hidup dalam perbudakan sebesar 1,86%. Namun jika melihat total penduduk Mauritania, jumlah orang yang diperbudak masih tergolong tinggi. Korban perbudakan didominasi kelompok Haratine dan perempuan mewakili 80% korban perbudakan yang terjadi di Mauritania,³⁹ bukan sesuatu yang keliru jika masih banyak perempuan Haratine yang terjebak dalam kondisi perbudakan.

Simpulan

Peran-peran yang dimiliki UN Women yang direalisasikan dalam proyek kerja sama dengan program-program yang menjadi kunci untuk menghentikan praktik perbudakan, secara keseluruhan telah berhasil membawa perubahan dengan menurunnya jumlah korban yang

³⁶ UNHRC, 2020, *National Report Submitted in Accordance with Paragraph 5 of the Annex to Human Rights Council Resolution 16/21: Mauritania*, A/HRC/G.37/MRT/1, para. 55 & 108, hal. 8 & 14, dalam <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/281/89/P/DF/G2028189.pdf> [Diakses 21 Juli 2021].

³⁷ *Ibid.*, para. 135, hal. 17.

³⁸ OECD Development Centre, 2019, *Social Institution & Gender Index: Mauritania*, hal. 5-7, dalam <https://www.genderindex.org/wp-content/uploads/files/datasheets/2019/MR.pdf> [Diakses 1 Juni 2021].

³⁹ ASI, 2018, *Mauritanian Women Against Slavery*, *Op.cit.*

hidup dalam perbudakan sebesar 1,86% dalam rentang tahun 2014–2018. Adanya kalanya bahwa setiap upaya yang dilakukan tidak memberikan hasil yang maksimal seperti yang ditargetkan. Berdasarkan kasus yang berhasil dituntut serta perempuan korban perbudakan yang mendapatkan bantuan, jumlah tersebut tidak sebanding dengan estimasi jumlah orang yang masih hidup dalam perbudakan. Dominasi perempuan sebagai korban perbudakan di Mauritania cukup menjelaskan masih tingginya tingkat kerentanan perempuan pada praktik kekerasan dalam perbudakan.

Bantuan dari pemerintah Mauritania melalui program-program reformasi yang menysasar kemiskinan, diskriminasi, dan pengangguran yang selaras dengan proyek UN Women tidak sepenuhnya menjadi pendukung untuk menciptakan perubahan yang signifikan. Kehadiran UN Women hanya sebatas membantu semaksimalnya dalam mengurangi perbudakan dan masalah-masalah yang ditimbulkan terhadap perempuan serta mengawasi jalannya program-program pemerintah yang hadir sebagai hasil advokasi. Sementara perubahan signifikan juga sangat tergantung bagaimana andil pemerintah dalam memutuskan dan menerapkan kebijakan untuk mengakhiri perbudakan yang terjadi.

Daftar Pustaka

- Bakry, Umar Suryadi. 2017. *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*, Edisi Pertama. Depok: Kencana.
- Dugis, Vinsensio. 2016. *Teori Hubungan Internasional: Perspektif-Perspektif Klasik*. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis.
- Lovejoy, Paul E. 2011. *Transformations in Slavery: A History of Slavery in Africa*, 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press.
- Phung, Kam dan Crane, Andrew. 2019. *The Sage Handbook of Human Trafficking and Modern Day Slavery: The Business of Modern Slavery: Management and Organizational Perspectives*. California: SAGE Publications Inc.
- Archer, Clive. 2001. *International Organization*, Edisi Ketiga. New York: Routledge.
- Bullard, Alice. 2005. “De la Kolonisasi la Mondialisation. Les Vicissitudes de l’esclavage en Mauritanie” *Cahiers d’Études Africaines*, Vol. 45: 751-769. Diakses dari <https://journals.openedition.org/etudesafricaines/14997>
- Gyuracz, Veronika. 2014, “Comparative Analysis of Contemporary Slavery in West Africa” *European Scientific Journal* : 156-164. Diakses dari <https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/4018/3829>
- Anti Slavery International, Minority Rights Group Internasional et SOS-Esclaves. “Rapport Alternatif pour le Comité des Droits de l’Homme, 126ème Session”. Juli 2019. Diakses

- dari
<https://minorityrights.org/wp-content/uploads/2019/06/2019-CCPR-Mauritania-Update-June-2019.pdf>
- Anti Slavery International. "Mauritania : Descent-Based Slavery". 2018. Diakses dari www.antislavery.org/what-we-do/mauritania/
- Anti Slavery International. "Mauritanian Women Against Slavery". 2018. Diakses dari <https://www.antislavery.org/mauritanian-women-slavery-feature/>
- Anti Slavery International. "What is Modern Slavery". 2018. Diakses dari www.antislavery.org/slavery-today/modern-slavery/
- Government of Mauritania . "Loi n° 2015-031 Portant Incrimination de l'esclavage et Réprimant les Pratiques Esclavagistes". Diakses dari <http://www.cdah.gov.mr/images/RECUEILTEXTESDROITSDELHOMME2019.pdf>
- Government of Mauritania. "Decret N° 2016-077 Du 15 Avril 2016 Instituant Une Journée Nationale de Lutte Contre les Pratiques Esclavagistes". Diakses dari <http://www.cdah.gov.mr/images/RECUEILTEXTESDROITSDELHOMME2019.pdf>
- OECD Development Centre. "Social Institution & Gender Index: Mauritania". 2019. Diakses dari <https://www.genderindex.org/wp-content/uploads/files/datasheet/s/2019/MR.pdf>
- Sutter, John D. "Mauritania Slavery's Last Stronghold". 2012. Diakses dari <https://edition.cnn.com/interactive/2012/03/world/mauritania.slaverys.last.stronghold/index.html>
- U.S. Department of State. "2015 Trafficking in Persons Report: Mauritania". 2015. Diakses dari <https://www.refworld.org/docid/55b73bc515.html>
- U.S. Department of State. "2016 Trafficking in Persons Report: Mauritania" 2016. Diakses dari <https://www.refworld.org/docid/577f95d62f.html>
- UN Human Rights Council. "National Report Submitted in Accordance with Paragraph 5 of the Annex to Human Rights Council Resolution 16/21: Mauritania" A/HRC/WG.6/23/MRT/1. 2015. Diakses dari <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/173/46/PDF/G1517346.pdf?f>
- UN Human Rights Council. "National Report Submitted in Accordance with Paragraph 5 of the Annex to Human Rights Council Resolution 16/21: Mauritania" A/HRC/G.37/MRT/1. 2020. Diakses dari <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/281/89/PDF/G2028189.pdf?f>

- UN Human Rights Council. "Report of the Special Rapporteur on Contemporary Forms of Slavery, Including Its Causes and Consequences, Gulnara Shahinian: Follow-up on mission to Mauritania" A/HRC/27/53/Add.1. 2014. Diakses dari https://digitallibrary.un.org/record/778854/files/A_HRC_27_53_Add-1-EN.pdf
- UN Human Rights Council. "Report of the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women on the activities of the United Nations Trust Fund in Support of Actions to Eliminate Violence against Women, Note by the Secretary-General" A/HRC/35/3-E/CN.6/2017/7. 2017. Diakses dari dalam <https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/35/3-E/CN.6/2017/7>
- UN Women. "United Nations Trust Fund to End Violence Against Women Annual Report 2015: 20 Years of Grant-Making" 2015. Diakses dari <https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20untf/publications/2016/06/un%20trust%20fund%202015%20annual%20report-spreads.pdf?la=en&vs=3034>
- United Nations. "International Day for the Abolition of Slavery". 2017. Diakses dari <https://www.un.org/en/observances/slavery-abolition-day>
- Walk Free Foundation. "The Global Slavery Index 2013". 2013. Diakses dari http://lft.ee/admin/upload/files/GlobalSlaveryIndex_2013_Download_WEB1.pdf
- Walk Free Foundation. "The Global Slavery Index 2014". 2014. Diakses dari <https://reliefweb.int/report/world/global-slavery-index-2014>
- Walk Free Foundation. "The Global Slavery Index 2018". 2018. Diakses dari <https://downloads.globalslaveryindex.org/ephemeral/GSI-2018-FNL-190828-CO-DIGITAL-P-1642269405.pdf>